



Peran Stakeholder terhadap Program Agroforestri dan Pendapatan Rumah Tangga Petani LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti

The Role of Stakeholders in the Agroforestry Program and Household Income of LMDH Rengganis Farmers, Pakis Village, Panti District

Nikolas Dwi Setio Aji¹ ✉, Djoko Soejono¹

¹ Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 28 Jul 2021 Direvisi 22 Sep 2021 Diterbitkan 18 Okt 2021	<i>Forest management carried out by the Panti District community in collaboration with Perhutani is regulated through an agroforestry-based Social Forestry program. This study focuses on the role and contribution of stakeholders to the agroforestry program, the household income of agroforestry farmers and the contribution of the household income of agroforestry and non-agroforestry farmers. The research method uses analytical descriptive. The sampling method used purposive sampling and incidental sampling. The data collection method used primary and secondary data. The data analysis tool uses quantitative description, income analysis and analysis of household income contribution of agroforestry farmers. The results showed that: (1) LMDH Rengganis acts as a policy creator, coordinator, facilitator, and implementer. Perhutani has a role as coordinator, facilitator and accelerator. KLHK acts as a policy creator. SDInpres and Bank BRI have a role as a facilitator. Community Empowerment Team (TPM) as facilitator and accelerator. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember as facilitator, coordinator and accelerator. Village government as coordinator; (2) The average income of agroforestry is Rp. 24,673,333/year and is classified as profitable; (3) The contribution of agroforestry to LMDH Rengganis farmers in Pakis Village, Panti Sub-district is categorized as high with a percentage of 84%.</i>
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628	
DOI doi.org/10.19184/jkrn.v2i1.25954	
Keywords: <i>Social forestry, agroforestry, stakeholders, role, and agroforestry income</i>	

✉ Penulis Koresponden :

E-mail : nicolasdwi08@gmail.com

	<p>ABSTRAK</p> <p><i>Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Panti bekerjasama dengan pihak Perhutani yang diatur melalui program Perhutanan Sosial berbasis agroforestri. Penelitian ini berfokus kepada peran dan kontribusi stakeholder terhadap program agroforestri, pendapatan rumah tangga petani agroforestri dan kontribusi pendapatan rumah tangga petani agroforestri dan non agroforestri. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan sampling insidental. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Alat analisis data menggunakan deskripsi kuantitatif, analisis pendapatan dan analisis kontribusi pendapatan rumah tangga petani agroforestri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) LMDH Rengganis berperan sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, dan implementer. Pihak Perhutani memiliki peran sebagai koordinator, fasilitator dan akselerator. KLHK berperan sebagai policy creator. SDInpres dan Bank BRI memiliki peran sebagai fasilitator. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM) sebagai fasilitator dan akselerator. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember sebagai fasilitator, coordinator dan akselerator. Pemerintah desa sebagai koordinator; (2) Rata-rata pendapatan agroforestri sebesar Rp24.673.333/tahun dan tergolong menguntungkan; (3) Kontribusi agroforestri pada petani anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti berkategori tinggi dengan persentase sebesar 84%.</i></p>
<p>Kata kunci: <i>Perhutanan sosial, agroforestry, stakeholder, peran, dan pendapatan agroforestry</i></p>	<p>© 2021, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ</p>

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mendukung pemerintah dalam pembangunan hutan milik negara. Berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pengelolaan hutan telah dibuat adanya suatu rencana strategis dalam pembangunan kawasan hutan di Jawa Timur. Kebijakan pemerintah di lingkup provinsi merupakan salah satu dukungan atas kebijakan pemerintah pusat, dimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Ha atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan hutan. Pengalokasian Kawasan tersebut diberlakukan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Kastanya et al., 2018) . Hal tersebut menjadi salah satu komitmen kuat pemerintah dalam mencapai demokratisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia.

Kabupaten Jember memiliki potensi pengembangan sektor kehutanan yang prospektif dengan melihat hasil produksi dari hasil hutan rakyat di Kabupaten Jember dari tahun 2006 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai rata-rata 704.408 batang/tahun Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, (2015), Masyarakat Kabupaten Jember yang berada di pinggiran hutan juga bergantung terhadap hasil hutan yang dikelolanya untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya.

LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti saat ini merupakan salah satu implementasi dari adanya kebijakan terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan pembentukan LMDH Rengganis pihak perhutani telah berperan dalam membangun kerjasama antar petani maupun antar *stakeholder* lain yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan di Desa Pakis Kecamatan Panti. Anggota LMDH Rengganis tidak hanya masyarakat Desa Pakis saja namun juga terdapat beberapa desa yang berada di sekitar Desa Pakis yaitu Desa Badean, Kemuningsari Lor, Mangli, Kaliwining, Glagahwero, Kemiri dan Tugusari. Bentuk kerjasama yang diterapkan adalah sistem kemitraan antar masyarakat petani hutan dengan pihak perhutani. Peranan *stakeholder* seperti Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember, Pemerintah Desa Pakis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SDInpres yang semuanya memberikan pendampingan baik teknis maupun non teknis sekaligus sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi dengan masyarakat khususnya yang tergabung dalam LMDH Rengganis. Hubungan kemitraan kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam Program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema KULIN KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) yang sudah dilaksanakan dengan KPH Wilayah Jember memiliki fungsi, peran, hak dan kewajibannya masing-masing yang bertujuan untuk berkontribusi dan mendukung program pemerintah untuk membangun hutan lestari masyarakat sejahtera.

Masyarakat Desa Pakis dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya sangat bergantung kepada hasil hutan melalui usahatani sistem agroforestri. Komoditas yang cocok dibudidayakan serta bisa meningkatkan pendapatan petani di sekitar kawasan hutan Desa Pakis Kecamatan Panti diantaranya adalah kopi, durian, alpukat, pisang dan petai. Pengelolaan hutan dengan sistem agroforestri merupakan pengelolaan hutan yang paling baik dilaksanakan, karena selain bisa mempertahankan fungsi dan manfaat hutan dari kaidah konservasi sebagai penyangga kehidupan tentunya juga bisa merubah kondisi perekonomian petani yang berada disekitar kawasan hutan kearah yang lebih baik. Hal yang dapat dirasakan oleh petani di sekitar kawasan hutan adalah perbedaan kondisi ekonomi yang dialami saat ini sehingga bisa dan mampu untuk menopang kebutuhan hidup seperti biaya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebutuhan lain bahkan menabung.

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) peran dan kontribusi *stakeholder* terhadap program agroforestri, 2) pendapatan rumah tangga petani agroforestry dan non agroforestry dan 3) kontribusi agroforestry terhadap pendapatan petani agroforestry dan non agroforestry anggota LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. Penerapan agroforestri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengatasi masalah-masalah lingkungan (H, Supriadi dan D, 2015). Petani-petani sekitar hutan yang menerapkan sistem agroforestri dapat terbantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui fungsi ekologi, sosial ekonomi dan budaya. Agroforestri saat ini masih menjadi sistem yang hanya diterapkan oleh petani-petani kecil dan masih sering ditemukan di sekitar rumah penduduk yang berada dipinggir hutan (Widianto, K.Suharjito, & Sardjono, 2003). Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan meningkatkan kebutuhan pangan namun lahan juga akan semakin menyempit

akibat adanya alih fungsi lahan. Penerapan sistem agroforestri merupakan salah satu upaya dalam optimalisasi penggunaan lahan pertanian secara berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang mandiri karena tidak hanya kebutuhan ekonomi saja yang didapat dari agroforestri namun masyarakat juga dapat menggunakan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga.

METODE PENELITIAN

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive method*) yaitu LMDH Rengganis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *sampling insidental*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui tujuan penelitian pertama mengenai peran dan kontribusi *stakeholder* menggunakan analisis deskriptif. Identifikasi *stakeholder* pertama kali dilakukan agar dapat diketahui *stakeholder* yang terlibat dalam Perhutanan Sosial di Desa Pakis kemudian dilakukan pemetaan peran dan kontribusi *stakeholder*.

Analisis data pada rumusan masalah yang kedua dengan menghitung pendapatan rumah tangga yang di dapat oleh anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti. Perhitungan pendapatan rumah tangga didapatkan dari rumus, sebagai berikut:

$$Pd = TR - TC$$

$$TR = Py \times Y$$

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

Pd = Pendapatan (Rp)

TR = Total penerimaan (Rp)

TC = Total biaya (Rp)

Py = Harga Produk

Y = Jumlah produksi

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel

Kriteria pengambilan keputusan analisis pendapatan rumah tangga petani terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Apabila TR lebih besar dari TC maka usaha yang dilakukan menguntungkan,
2. Apabila TR sama dengan TC maka usaha yang dilakukan mengalami impas atau BEP,
3. Apabila TR lebih kecil dari TC maka usaha yang dilakukan mengalami kerugian.

Analisis besarnya kontribusi pendapatan rumah tangga digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Besarnya kontribusi agroforestri didapat dari adanya perhitungan rumus berikut:

$$KR = \frac{P_{hr}}{P_{rt}} \times 100\%$$

Keterangan:

KR = kontribusi pendapatan dari hutan rakyat pola agroforestri (%)

P_{hr} = pendapatan dari agroforestri (Rp/tahun)

P_{rt} = pendapatan total rumah tangga petani (Rp/tahun)

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Pendapatan

No.	Kriteria	Persentase
1.	Sangat Rendah	1-19 %
2.	Rendah	20-39 %
3.	Sedang	40-59 %
4.	Tinggi	60-79 %
5.	Sangat Tinggi	≥80 %

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kontribusi *Stakeholder* terhadap Program Agroforestri Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti.

Keikutsertaan *stakeholder* dalam program agroforestri petani LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengembangkan dan memaksimalkan program agroforestri petani. Identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial bersama masyarakat sekitar kawasan hutan dikelompokkan menurut Wakka (2014), menjadi *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang menerima dampak positif atau negatif dari adanya suatu kegiatan. *Stakeholder* sekunder merupakan pihak yang hanya sebagai perantara dalam membantu suatu kegiatan, sedangkan *stakeholder* kunci merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting dalam memainkan suatu kebijakan yang dapat berpengaruh pada suatu kegiatan. Berikut tabel identifikasi *stakeholder-stakeholder* yang terlibat pada Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti.

Tabel 2. Identifikasi *Stakeholder* Berdasarkan *Stakeholder* Primer, Sekunder dan Kunci

<i>Stakeholder</i> Primer	<i>Stakeholder</i> Kunci	<i>Stakeholder</i> Sekunder
1. LMDH Rengganis	1. KLHK	1. SDInpres
2. Perhutani		2. Bank BRI
		3. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM)
		4. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember
		5. Pemerintah Desa
		6. Media

Sumber: Data Primer diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa *stakeholder* primer meliputi anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis dan perhutani. Masyarakat di Desa Pakis Kecamatan Panti yang telah bergabung dalam kelompok LMDH Rengganis yang mendapatkan dampak langsung dari adanya program agroforestri yang bermitra dengan pihak perhutani. Anggota akan mendapatkan haknya berupa hak guna lahan milik perhutani dan mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Pihak perhutani menjadi *stakeholder* primer karena juga akan menerima dampaknya dari program perhutanan sosial yaitu berupa *sharing profit* dari hasil panen petani anggota LMDH Rengganis.

Stakeholder kunci dalam pengembangan agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti meliputi LMDH Rengganis dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan menjadi penanggungjawab atas berjalannya suatu kegiatan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengurus LMDH Rengganis sebagai penentu arah pengembangan kawasan hutan dengan tujuan kesejahteraan anggota tercapai. Pengambilan keputusan yang dilakukan terkait penentuan program kerja kelompok, penentuan bagi hasil kopi, pengecekan kondisi lahan di lapang.

Stakeholder yang termasuk kedalam *stakeholder* sekunder adalah SDInpres, Bank BRI, Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember, Pemerintah Desa Pakis dan media. *Stakeholder* yang tergolong dalam *stakeholder* sekunder tidak memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung atau hanya sebagai perantara dalam keberlangsungan program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder* sekunder biasanya meliputi pendampingan, penyuluhan dan pelatihan terkait pengembangan hutan di kawasan Desa Pakis Kecamatan Panti.

Masing-masing *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti yang berada di kawasan hutan. Pembagian peran dikelompokkan menjadi beberapa peran, yaitu sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator. Berdasarkan teori dari Nugroho & Zauhar, (2014), mengartikan *Policy Creator* sebagai pihak yang memiliki peran sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Koordinator merupakan *stakeholder* yang mengkoordinasi segala kebutuhan dan kepentingan masing-masing *stakeholder* yang terkait dalam pengembangan agroforestry. Fasilitator merupakan *stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi dan mencukupi segala yang dibutuhkan oleh kelompok yang menjalankan suatu program. *Implementer* merupakan *stakeholder* yang menjalankan kebijakan, didalamnya juga termasuk kelompok sasaran yang mendapatkan program. Akselerator memiliki peran dalam mempercepat atau sebagai katalisator agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Lembaga yang berperan sebagai *policy creator* adalah LMDH Rengganis dan KLHK. LMDH Rengganis sebagai *policy creator* memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan dalam mengatur anggotanya sedangkan KLHK menjadi pemangku kebijakan yang mengeluarkan peraturan menteri terkait kebijakan pengelolaan hutan milik negara. Peran sebagai koordinator meliputi beberapa *stakeholder*, yaitu LMDH Rengganis, perhutani dan pemerintahan desa. Koordinator berperan menjadi penghubung atau yang mengkoordinir antar *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya yang terlibat.

Stakeholder yang termasuk dalam peran fasilitator dalam pengembangan agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti adalah LMDH Rengganis, perhutani, SDInpres, perbankan, Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM), aparat keamanan dan pihak media. Fasilitator memiliki peran dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran dalam menunjang terlaksananya kegiatan masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti. Pembagian peran yang lain adalah sebagai implementer yang berperan sebagai pelaksana suatu kebijakan, dalam hal ini yang termasuk kedalam

implementer adalah LMDH Rengganis baik pengurus maupun anggota yang ada didalamnya. Terdapat juga peran yang bertugas dalam mempercepat berjalannya suatu kegiatan atau program sesuai dengan waktu yang ditentukan, *stakeholder* yang berperan sebagai akselerator dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah perhutani dan Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM). Pembagian peran dan kontribusi masing-masing *stakeholder* dapat juga dilihat pada tabel 4.7, pembagian dilakukan berdasarkan identifikasi *stakeholder* primer, sekunder dan primer. Berikut penyajian pada tabel 4.7 terkait pembagian peran dan kontribusi *stakeholder* yang terlibat dalam perhutanan sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti.

Tabel 3. Pemetaan *stakeholder* berdasarkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan program agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti

Stakeholder primer	Peranan	Kontribusi
LMDH Rengganis	1. <i>Policy Creator</i> 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementer	1. Pengambilan keputusan berdasarkan rapat kepengurusan kelompok. 2. Pembentukan UPS di bidang wisata, pengembangan kopi, ternak dan durian. 3. Pembentukan kepengurusan LMDH 4. Transparansi keuangan LMDH kepada Anggota. 5. Mengurus administrasi pendaftaran anggota baru.
Perhutani	1. Koordinator 2. Fasilitator 3. Akselerator	1. Merekomendasikan perizinan penggunaan lahan bagi petani yang tergabung dalam anggota LMDH Rengganis. 2. Pendampingan berupa pembentukan LMDH Rengganis 3. Penerima bagi hasil berupa kopi kering milik petani sesuai aturan yang berlaku 4. Memberikan pelatihan dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan pendampingan LMDH. 5. Mengkawal pendataan LMDH di kementerian.
Stakeholder Kunci	Peranan	Kontribusi
KLHK	1. <i>Policy Creator</i>	1. Memberikan kebijakan secara nasional yang langsung dibawah oleh menteri. 2. Mengeluarkan aturan-aturan terkait perhutanan sosial seperti Permen No. 83 dan 38
Stakeholder Sekunder	Peranan	Kontribusi
SDInpres	1. Fasilitator	1. Memberikan pendampingan-pendampingan pada anggota. 2. Memberikan bantuan advokasi terhadap konflik yang muncul pada anggota LMDH Rengganis.
Bank BRI	1. Fasilitator	1. Memberikan pinjaman modal kepada petani (KUR)
Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM)	1. Fasilitator 2. Akselerator	1. Pendampingan secara mendasar LMDH

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember	1. Fasilitator 2. Koordinasi 3. Akselerator	1. Pendampingan petani berdasarkan Pergub No. 48 tentang Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas kehutanan. 2. Pembinaan kelompok LMDH Rengganis dalam membentuk road map penyusunan KUPS 3. Pengawasan seluruh kegiatan LMDH dan Perhutani 4. Penyuluhan kepada petani
Pemerintahan Desa Media	1. Koordinasi 1. Fasilitator	1. Koordinasi kegiatan-kegiatan LMDH 1. Peliputan kegiatan yang dilakukan masyarakat ataupun anggota di kawasan hutan.

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

1. LMDH Rengganis

LMDH Rengganis memiliki peran sebagai *policy creator*, pelaksana, koordinator, fasilitator dan implementer. *policy creator* yaitu peran yang dimiliki oleh LMDH Rengganis sebagai pembuat aturan main kelompok yang terbagi menjadi pengurus dan anggota, pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, dan sebagainya yang menyangkut kedalam pengembangan organisasi dengan musyawarah anggota yang dibantu oleh pihak perhutani dan Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM).

Kesadaran masyarakat dalam membentuk LMDH memberikan sumbangsih keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah. Hal ini juga terdapat saling ketergantungan antar masyarakat dengan perhutani yang bersifat mutualisme. LMDH Rengganis secara struktural kepengurusan bertanggungjawab kepada anggota dalam meningkatkan tujuan-tujuan kelompok baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pembentukan KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial menjadi bagian dalam kontribusi LMDH Rengganis dalam memajukan taraf ekonomi dan mengoptimalkan potensi hutan yang berada di wilayah Desa Pakis. KUPS yang dibentuk meliputi kopi, wisata, durian, wisata dan peternakan. Pembentukan KUPS ini sejalan dengan konsep agroforestri.

2. Perhutani

Perum Perhutani merupakan perusahaan negara yang diberi tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan negara. Pembentukan program agroforestri bersama dengan masyarakat desa kawasan hutan menjadi salah satu cara dalam mengelola hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan bersama dengan masyarakat disekitarnya. Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) juga menjadi salah satu tugas perhutani dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pengelolaan hutan demi mensejahterakan masyarakat didalam maupun disekitar kawasan hutan, dalam hal ini pihak Perhutani menjadi fasilitator yang dibantu dengan Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM).

Kontribusi yang telah dilakukan oleh pihak perhutani dalam menjalankan perannya sebagai koordinator adalah megkoordinasikan kebutuhan *stakeholder* yang terhubung dengan perhutani. Salah satu bentuk koordinasi yaitu dengan pihak TPM dalam memberikan wewenang membangun kerjasama dengan pihak LMDH. Koordinasi yang dilakukan dengan pihak LMDH yaitu melakukan pendataan atau inventarisasi kebutuhan lembaga terkait administrasi hak kelola lahan. Bentuk koordinasi lainnya dengan pihak bank dalam menghubungkan pihak LMDH untuk mendapat bantuan pinjaman modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kontribusi yang telah dilakukan terkait perannya sebagai fasilitator yaitu memberikan hak anggota LMDH untuk mengelolah lahan hutan sepenuhnya selama 35 tahun berdasarkan Permen No P.83, mendata anggota LMDH Rengganis yang terdaftar supaya diberikan Surat Keputusan yang berasal dari Menteri dan tercatat dalam data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bersinergis dengan jajaran yang ada dibawahnya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan.

3. KLHK

Bentuk kontribusi KLHK dalam kegiatan program agroforestri tertuang dalam kebijakan terkait membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar. Penempatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam sistem pengelolaan hutan secara lestari diatur kedalam peraturan menteri nomer P.83 tentang Perhutanan sosial. Bentuk kerjasama dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang dapat mendukung potensi-potensi daerah kawasan hutan yang menjadi bagian wilayah LMDH Rengganis seperti pemanfaatan wisata alam, pengembangan budidaya kopi dan durian.

Kontribusi lainnya yang terkait tentang pemberian izin diberikan melalui Surat Keputusan menteri yang memberikan ruang bagi anggota untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan selama 35 tahun. Bentuk kepedulian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diperjelas melalui pembangunan tata hubungan dengan pemerintah pusat, daerah maupun para pihak lainnya seperti LSM, Perguruan tinggi, swasta serta masyarakat sebagai pelaku utama. Pemerintah pusat merespon usulan tersebut dengan memberikan akses kepada seluruh menteri-menteri dibawahnya untuk mendukung terlaksananya program perhutanan sosial ini dengan tujuan agar terselenggaranya masyarakat hutan yang mandiri secara ekonomi. Koordinasi-koordinasi dilakukan dengan pihak KPH sebagai pemangku dan pengelola kawasan ditingkat tapak. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh KLHK terhadap masyarakat ini juga diharapkan agar kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dapat meningkat. Pemberian kewenangan kepada pihak-pihak dibawahnya juga menjadi bagian kontribusi KLHK dalam mempercepat pengimplementasian perhutanan sosial khususnya diwilah hutan Desa Pakis Kecamatan Panti.

4. SDInpres

SDInpres atau Studi Dialektika Indonesia dalam perspektif merupakan salah satu NGO yang berada di Jember. Lembaga ini merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang menitikberatkan pada penguatan masyarakat desa. Motivasi SDInpres melakukan gerakan adalah adanya maslaah yang bersifat struktural dan membawa dampak marjinalisasi petani dari sumber daya lingkungannya. Program lembaga ini berfokus pada penguatan petani dan masyarakat desa dari ketidakberdayaannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta budaya.

Sejak tahun 2004 SDInpres telah memberikan pendampingan pada masyarakat desa hutan yang ada dibawah lereng Gunung Hyang Argopuro tepatnya Desa Pakis Kecamatan Panti. Keseriusan dalam pendampingan ditunjukkan mulai dari adanya pendampingan pembentukan kelompok tani hutan melalui kerja-kerja organisasi dengan tetap melibatkan hubungan antara nilai-nilai ekologis dan fungsi ekonomi hutan. Selain itu SDInpres juga membantu dalam advokasi dan pendampingan atas kasus-kasus yang terjadi ditengah masyarakat, penerbitan media komunikasi, pendidikan dan pelatihan bagi petani, dan pembentukan jaringan kerja ekonomi.

5. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM)

Tim pendamping masyarakat (TPM) merupakan salah satu kelompok yang berada dibawah Perhutani. Peranan TPM adalah sebagai fasilitator dan akselerator dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang berada pada kawasan hutan. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan masyarakat dalam membentuk kelompok LMDH Rengganis. Pihak-pihak pendampingi hanya memberikan pendampingan atau rekomendasi dalam merumuskan pembentukan kelompok LMDH. Masyarakat yang berperan aktif dalam mengusulkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kelompoknya termasuk dalam membuat visi dan misi suatu LMDH yang ada di Desa Pakis Kecamatan Panti.

Tim Pemberdayaan Masyarakat atau TPM merupakan lembaga yang menjadi penghubung antara pihak perhutani dengan LMDH Rengganis. TPM menjadi fasilitator yang membantu pihak LMDH Rengganis dalam mencukupi kebutuhan kelompok. TPM juga menjadi fasilitator dalam memberikan kelompok pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan wawasan dalam mendukung pengembangan potensi hutan. Bentuk pelatihan yang telah dilakukan diantaranya adalah pelatihan usaha perhutanan sosial, pelatihan usaha produktif agroforestri, pelatihan usaha perikanan. Sosialisasi perhutanan juga masih terus dilakukan oleh pihak TPM supaya masyarakat benar-benar paham dan mengaplikasikannya, ini dilakukan karena masyarakat masih terbiasa dengan kebijakan yang pernah ada sebelumnya yaitu kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

6. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember merupakan kepanjangan tangan Dinas Kehutanan yang memiliki tugas dalam membantu kerja Dinas Kehutanan untuk mendukung program perhutanan sosial pemerintah. CDK menjadi salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam urusan kehutanan oleh Dinas Kehutanan dan bertugas dalam melakukan pembinaan suatu kelompok salah satunya LMDH Rengganis. Kontribusi yang telah dilakukan CDK adalah dalam hal kegiatan pembinaan, pendampingan, penyuluhan dan monitoring. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Tata kelola kelembagaan dilakukan oleh pihak Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember kepada pihak LMDH Rengganis melalui pertemuan rutin yang diadakan sebulan sekali yang bertujuan untuk mengelola lembaga diantaranya mendampingi aktivitas LMDH Rengganis dan administrasi kelompok. Pokok pembahasan yang ada dalam pertemuan rutin meliputi pembinaan administrasi, partisipasi dan kehadiran anggota dalam pertemuan, menyusun rencana kegiatan kelompok, membangun hubungan kerjasama baik dalam kelompok maupun antar kelompok.

Tata kelola kawasan sangat berkaitan dengan RPKH (Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan) dan RTT (Rencana Teknik Tahunan) yang disusun oleh Perhutani. Program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) memiliki kebijakan yaitu, petani boleh mengajukan usulan secara tertulis kepada Perhutani tentang Pengelolaan Kawasan (Jenis dan jarak tanam). Tata kelola usaha adalah jenis usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan untuk mengolah hasil produksi menjadi suatu produk baik olahan atau kerajinan, pengurusan legalitas produk (SIUP, Izin Edar, Jaminan produk halal dan Hak Paten), Pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) KUB (Kelompok Usaha Bersama), Akses Pasar dan Mitra Usaha. Pihak CDK (Penyuluh Kehutanan) berperan sebagai fasilitator untuk mengakses dan mengarahkan bahkan

melaksanakan koordinasi dengan para pihak serta menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti FGD (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan seluruh instansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Jember untuk mewujudkan tata kelola usaha tersebut.

Kontribusi dalam pengawasan dilakukan oleh pihak CDK melalui monitoring dan evaluasi pada akhir tahun untuk meninjau laporan dari pihak perhutani selaku pengelola kawasan hutan. Selain itu pihak CDK juga mengawasi apabila terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pihak perhutani dalam melakukan kelola hutan, tugas dari CDK dalam hal ini juga menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti pembagian lahan garapan dan pembagian hasil usaha. Kontribusi berupa penyuluhan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi terkait perhutanan sosial karena dalam prosesnya kebijakan perhutanan sosial masih merupakan kebijakan yang baru sehingga kelompok masyarakat yang berada pada kawasan hutan perlu diberikan pemahaman perbedaan antara kebijakan pemerintah tentang PHBM dan Perhutanan sosial. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perhutanan sosial yang masih belum maksimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang berada pada kawasan huta khususnya di Desa Pakis Kecamatan Panti. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak CDK sebelumnya sudah terbagi berdasarkan rapat yang dilakukan dengan pihak-pihak NGO setempat seperti SDInpres sehingga tidak ada tumpang tindih program kerja penyuluhan antara pihak CDK dengan pihak-pihak penyuluh lainnya.

Kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan dalam mendukung perannya sebagai fasilitator dan koordinator seperti penyusunan perencanaan agenda kegiatan yang telah dilakukan kepada kelompok LMDH Rengganis. Upaya dukungan dalam pengembangan usaha masyarakat anggota LMDH yaitu memberikan akses kepada pihak Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui fasilitas bantuan benih ikan lokal yang disebar di sungai kawasan hutan Desa Pakis Kecamatan Panti, memfasilitasi pengurusan izin edar produk kopi bubuk rengganis kepada PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Jember.

7. Bank BRI

Pihak perbankan menjadi fasilitator yang berkontribusi dalam penyedia jasa peminjaman modal bagi masyarakat yang tergabung dalam LMDH Rengganis. Tujuan bantuan modal ini guna mendukung petani-petani hutan dalam menjalankan usahanya. Permasalahan terkait modal menjadi masalah utama petani dalam menjalankan usahanya. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjawab permasalahan petani tersebut dengan menjadi fasilitator dengan mengeluarkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang tergolong mudah bagi petani anggota LMDH Rengganis. Pinjaman modal yang diberikan berupa Kredit Usahatani (KUR) dan kemitraan ini dimulai sejak tahun 2017 dengan besar pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI sebesar 1,025 milyar, tahun 2018 sebesar 5,01 milyar, 2019 sebesar 5,09 milyar dan tahun 2020 sebesar 2,05 milyar. Penerima KUR pada LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti belum seluruhnya mendapatkan bantuan modal, namun hanya sekitar 44% atau kurang lebih 235 orang dari total anggota 536.

8. Pemerintahan Desa

Dukungan pemerintahan desa dalam program agroforestri melalui perhutanan sosial adalah untuk membina dan mengawasi jalannya LMDH Rengganis yang berada dibawah pemerintahan desa. Pembentukan LMDH Rengganis. pada mulanya

juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa supaya mendapat surat rekomendasi yang selanjutnya akan diteruskan pada notaris. Pengeluaran SK dari pemerintahan desa ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PHBM saat itu serta mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakteristik sosial masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti.

9. Media

Kontribusi pihak media dalam pengelolaan agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti adalah dengan mempublikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani kawasan hutan. Bentuk publikasi yang sudah pernah dilakukan adalah dengan media online yang berisi sejarah pembentukan LMDH Rengganis, panen raya kopi, panen raya durian, bantuan dari pemerintah dan lainnya.

Pendapatan per Tahun pada Rumah Tangga Petani Agroforestri dan Non Agroforestri Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti

Pendapatan rumah tangga petani hutan yang tergabung sebagai LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti diperoleh dari pengelolaan hutan maupun berasal dari non hutan. Pendapatan petani atau usahatani merupakan penghasilan petani yang diperoleh dari seluruh penjualan hasil produksi dari usahatani (Subandriyo, 2016). Pendapatan juga dapat dikatakan sebagai hasil pengurangan antara total penerimaan yang diterima petani dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam melakukan usahatani. Mayoritas sumber pendapatan berasal dari pengelolaan agroforestri dimana para petani mengolah lahan hutan milik perhutani dengan menanam beberapa jenis tanaman musiman dan tanaman tahunan seperti kopi, durian, alpukat, pisang dan porang. Beberapa petani juga mendapatkan sumber pendapatan dari hasil non agroforestri dengan melakukan usaha sampingan seperti wiraswasta, buruh tani dan perangkat desa. Pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini merupakan hasil penerimaan baik dari hutan ataupun non hutan yang dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Berdasarkan penelitian Sitepu, (2014), yang berjudul “Kontribusi Pengelolaan Agroforestri terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani” membahas terkait kontribusi antara pendapatan rumah tangga petani yang berasal dari agroforestry dan non agroforestry. Berdasarkan hasil yang diperoleh Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani sebesar 68,60% dari pendapatan total rumah tangga dengan pendapatan rata-rata Rp12.981.442 per tahun. Sisanya sebanyak 31,4% berasal dari pekerjaan lain atau non agroforestri seperti PNS, wiraswasta, supir dan buruh bangunan. Besarnya kontribusi agroforestri yang besar disebabkan karena petani memanfaatkan lahannya secara maksimal.

Perhitungan total pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan yang berasal dari program agroforestri yang diterapkan oleh petani dan pendapatan yang berasal dari non agroforestri atau luar hutan. Pendapatan dari pengelolaan agroforestri merupakan pendapatan yang didapat atas kegiatan yang dilakukan oleh petani didalam kawasan hutan, seperti melakukan penjualan hasil produksi tanaman yang ditanam yaitu kopi, durian, pisang dan porang setelah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan petani baik biaya tetap dan biaya variabel.

Menurut Hariyati, (2007), Biaya variabel total merupakan biaya yang muncul akibat adanya penggunaan input variabel seperti biaya tenaga kerja, biaya pupuk, biaya bibit dan biaya pestisida. Biaya tetap total merupakan biaya yang timbul dari pemakaian input tetap dimana biaya yang digunakan tidak berubah meskipun jumlah output berubah seperti biaya lahan dan biaya penyusutan alat. Perhitungan rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan, penerimaan hutan dan pendapatan dari hutan maupun non hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rata-Rata Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Agroforestri dan Non Agroforestri Per Periode Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti Tahun 2020

No	Uraian	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Biaya Produksi		
	Biaya Tetap (TFC)	Biaya Lahan (Rp/periode)	501050
		Biaya Penyusutan Alat (Rp/periode)	476192
	Total		977242
	Biaya Variabel (TVC)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	9729200
		Biaya Pupuk (Rp)	4147625
		Biaya Bibit (Rp)	4926975
Total		Biaya Pestisida (Rp)	160125
			18963925
	TC = TFC+TVC		19941167
2	Penerimaan	Penerimaan Agroforestri	44614500
3	Pendapatan (Rp/periode)	Pendapatan Agroforestri (Rp)	24673333
		Pendapatan Non Agroforestri (Rp)	5357500
	Total Pendapatan		30030833

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pendapatan yang berasal dari hutan sebagian besar didapat dari hasil pengelolaan kopi dan durian. Pemerintah daerah mendukung masyarakat dalam pengelolaan kopi dan durian yang ada di kawasan hutan tersebut sehingga petani mendapatkan hasil yang cukup besar dari dua komoditas tersebut ditambah dengan komoditas lainnya seperti pisang, porang dan alpukat.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani hanya biaya operasional untuk pengelolaan kopi, hal ini dikarenakan tanaman-tanaman yang ditanam menjadi satu lahan dengan tanaman kopi sehingga biaya usahatani sudah menjadi satu dengan tanaman kopi. Total biaya yang dikeluarkan yaitu biaya lahan, biaya penyusutan alat, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, biaya bibit, dan biaya pestisida.

1. Biaya Lahan

Berdasarkan tabel 4. Rata-rata biaya lahan yang dikeluarkan petani adalah sebesar Rp501.050, dimana petani bermitra dengan pihak perhutani sehingga biaya lahan yang dimaksud berupa *sharing* hasil produksi kopi kering sebesar 30%. Meskipun terdapat kebijakan yang mengatur besaran pembagian kopi kenyataan dilapang berbeda dengan aturan main yang berlaku. Kebijakan *sharing* profit 30% belum diberlakukan oleh perhutani, hal ini dilakukan karena masih memberatkan pihak petani yang sebelumnya kebijakan yang berlaku tidak mencapai 30%. Selama ini meskipun kebijakan terbaru sudah dikeluarkan pihak

LMDH dan Perhutani hanya mengambil bagian dibawah 5%. Hal ini dikarenakan terlalu memberatkan petani dan dari dulu petani sudah terbiasa dengan peraturan sebelumnya yang memiliki besaran bagi hasil dibawah 30%. Pihak LMDH menjadi penanggungjawab dalam mengakomodir anggotanya serta kepada pihak perhutani dalam memberikan hak bagi perhutani untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2. Biaya penyusutan alat

Biaya rata-rata penyusutan alat adalah sebesar Rp476.192/ tahun, alat-alat yang digunakan pada umumnya yaitu sabit, cangkul, dan sepeda motor sebagai transportasi petani keluar masuk hutan. Umumnya petani hanya memiliki satu sepeda motor yang digunakan untuk bekerja di hutan. Terdapat beberapa petani yang memiliki alat-alat yang lebih modern dalam membantu proses usahataniya seperti, mesin pemotong rumput, mesin pulper, dan mesin semprot pestisida. Harga mesin pemotong rumput rata-rata seharga Rp1.200.000-Rp1.500.000, mesin pulper seharga Rp3.500.000-Rp4.000.000, alat semprot Rp1.200.000.

3. Biaya Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel rata-rata biaya tenaga kerja sebesar Rp97.293.200/tahun. Biaya tenaga kerja tersebut meliputi proses usahatani kopi hingga proses pengelolaan pasca panen. Proses-proses yang memerlukan tenaga kerja meliputi, pembibitan, pengangkutan pupuk, pemupukan, perawatan, penyiangan, wiwilan, pemetikan, pengangkutan, dan penjemuran.

4. Biaya Pupuk

Rata-rata pupuk yang digunakan oleh petani adalah pupuk subsidi, biasanya petani menggunakan jenis pupuk urea, ponska dan ZA. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk dalam satu kali masa tanam adalah sebesar Rp4.147.625/tahun. Kebutuhan pupuk masing-masing petani tidaklah sama salah satunya dipengaruhi oleh luasan lahannya.

5. Biaya Bibit

Bibit yang ditanam oleh petani bervariasi, mayoritas petani menanam kopi dan durian. Selain komoditas tersebut petani rata-rata juga menanam tanaman buah-buahan lainnya seperti pisang, alpukat dan umbi-umbian. Biaya bibit yang dikeluarkan merupakan bibit yang hanya dikelola oleh petani saja, selain tanaman yang diusahakan oleh petani seperti tanaman mahoni tidak dihitung sebagai biaya karena tanaman berkayu seperti mahoni merupakan tanaman asli didalam kawasan hutan. Rata-rata biaya total bibit yang dikeluarkan petani adalah sebesar Rp4.926.975. Hal ini tentunya diikuti dengan luasan lahan yang dimiliki petani, semakin luas lahan yang dimiliki maka kebutuhan bibit juga akan semakin banyak. Biaya rata-rata total bibit kopi adalah sebesar Rp2.579.975, biaya rata-rata total bibit pisang adalah sebesar Rp542.000, biaya rata-rata total bibit durian adalah sebesar Rp1.333.750.

6. Biaya Pestisida

Tidak banyak petani yang menggunakan pestisida untuk menjaga tanaman yang ditanam agar tidak terserang penyakit ataupun terserang hama. Hanya setengah dari total responden yang memakai dan rata-rata penggunaan pestisida berbeda-beda bergantung dengan kebutuhan petani. Berdasarkan tabel 4.9 total biaya yang digunakan untuk pestisida adalah sebesar Rp160.125.

Berdasarkan data biaya yang dikeluarkan petani maka dapat diketahui total biaya keseluruhan petani dalam satu kali masa tanam kopi adalah sebesar Rp19.941.167 dengan total biaya variabel sebesar Rp18.963.925 dan biaya tetap sebesar Rp977.242. Jumlah

penerimaan merupakan hasil yang diterima oleh petani sebelum dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani. Penerimaan hasil hutan yang diterima petani dalam setahun rata-rata sebesar Rp44.614.500/tahun. Berdasarkan hasil yang didapat besaran penerimaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani, apabila mengacu pada kriteria pengambilan keputusan maka pengelolaan hutan yang dilakukan oleh petani tergolong menguntungkan. Selanjutnya dalam menghitung pendapatan yang diperoleh petani dengan mengurangi hasil penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan petani sehingga berdasarkan tabel 4.9 total pendapatan rata-rata petani yang didapat dari hutan adalah sebesar Rp24.673.333/tahun. Pendapatan sampingan atau pendapatan yang didapat diluar hutan adalah sebesar Rp5.357.500/tahun.

Kontribusi Pendapatan Petani Agroforestri dan Non Agroforestri terhadap Petani Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti

Sejak masyarakat Desa Pakis melakukan pemanfaatan sumber daya hutan di wilayah Desa Pakis Kecamatan Panti kontribusi secara nyata telah dirasakan oleh petani-petani yang tinggal dikawasan hutan di Desa Pakis Kecamatan Panti. Kekayaan sumberdaya alam yang berasal dari hutan berkontribusi sebagai pemenuh pendapatan utama petani, dimana kontribusi pendapatan merupakan persentase hasil sumbangan pendapatan terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Pendapatan hutan di Desa Pakis Kecamatan Panti didominasi oleh tanaman kopi, durian, pisang dan tanaman lain yang dimiliki oleh beberapa petani seperti, alpukat, manggis dan porang. Pendapatan rumah tangga petani sebagian besar hanya berasal dari hutan namun terdapat sebagian kecil petani yang mendapatkan pendapatan dari pekerjaan sampingannya. Analisis kontribusi dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi usahatani terhadap pendapatan total rumah tangga petani dalam satuan persen (Dewi dan Qanti, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat melalui tabel besaran kontribusi program agroforestri dan non agroforestri.

Tabel 5. Kontribusi program agroforestri dan non agroforestri pada pendapatan rumah tangga petani di Desa Pakis Kecamatan Panti

No	Keterangan	Pendapatan (Rp)	Kontribusi (%)
1	Agroforestri	24673333	84,00
2	Non Agroforestri	5357500	16,00
Total		30030833	100,00

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa besaran pendapatan agroforestri lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari non agroforestri. Kontribusi pendapatan yang berasal dari agroforestri adalah sebesar 84% dengan luasan rata-rata lahan adalah 2,2 Ha dan 14% berasal dari non agroforestri. Menurut kriteria pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan yang berasal dari agroforestri sangat tinggi hal ini dikarenakan persentase kontribusi lebih dari 80% atau sebesar 86%. Alasan yang menjadikan kontribusi pendapatan agroforestri tinggi adalah karena petani dikawasan hutan menjadikan hutan sebagai sumber penghasilan utamanya. Masyarakat mengelola hutan dengan sistem agroforestri sederhana yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang diterima dari hutan sedangkan petani yang melakukan pekerjaan sampingan atau non agroforestri cenderung lebih sedikit.

Kesadaran petani dalam mengelola hutan secara tumpangsari memberikan hasil yang maksimal, sehingga meskipun petani tidak mencari pekerjaan sampingan diluar hutan kebutuhan hidupnya cukup dalam setahun. Komoditas kopi menjadi komoditas yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar kepada petani karena kopi menjadi komoditas utama yang ditanam oleh masyarakat dikawasan hutan. Komoditas selanjutnya adalah durian yang dapat memberikan kontribusi pendapatan. Potensi ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan mengadakan festival durian ketika panen raya durian tiba, selain itu pemerintah juga mendukung potensi kopi yang ada di Desa Pakis dengan memberikan bantuan berupa alat giling kopi. Pihak LMDH juga menjadikan fokus utama program kerjanya pada komoditas kopi dan durian agar dapat berkembang.

Kontribusi pendapatan hutan yang tinggi memberikan dampak kepada petani yang tergabung pada LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. Hal yang paling dirasakan adalah perubahan taraf ekonomi para petani. Masyarakat merasa taraf ekonomi semakin meningkat dengan mengelolah lahan hutan yang bermitra dengan pihak perhutani. Dampak ekonomi menurut Damsar dan Indrayani, (2016) menjelaskan bahwa ekonomi rumah tangga merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing. Dampak ekonomi melalui pendekatan sosiologi dapat dilihat dari adanya hubungan timbal balik antara ekonomi dengan masyarakat. Dampak ekonomi pada rumah tangga petani anggota LMDH Rengganis yang dirasakan juga meliputi adanya tabungan bagi sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan perabotan rumah tangga, dan sebagai modal pengembangan usaha seperti membeli lahan sawah dan membuka toko.

Perubahan sosial menurut Suryono, (2019), menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah berbagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi pada anggota LMDH Rengganis yang merasakan dampak sosial melalui kontribusi pendapatan rumah tangga petani dengan adanya program Perhutanan Sosial. Petani merasakan adanya saling ketergantungan antar masyarakat dalam mengelola lahan hutannya, salah satu contohnya adalah dengan memperkerjakan tetangganya ataupun saudaranya untuk membantu melakukan kegiatan usahatani. Masyarakat juga bergotong royong dalam pembangunan jalan desa yang didapatkan dari bagi hasil tanaman mahoni dengan pihak perhutani.

Selain itu rasa kepedulian antar masyarakat juga terbentuk, sebagai contoh apabila terdapat tetangga yang sedang mengalami musibah masyarakat lainnya masih menyempatkan waktu untuk berkunjung. Rasa kepedulian antar masyarakat juga terbentuk berupa memberikan pekerjaan atau memberdayakan orang-orang sekitar yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengelola lahan. Tingkat kesadaran masyarakat pun juga meningkat, setelah adanya penjarahan hutan dan bencana banjir yang pernah terjadi masyarakat semakin sadar dan saling mendorong antar masyarakat satu dengan yang lain agar menjaga kelestarian hutan.

KESIMPULAN

1. LMDH Rengganis memiliki peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator dan implementer. Bentuk kontribusi dari LMDH Rengganis adalah membentuk program kegiatan bagi anggota dalam rangka penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Pihak perhutani memiliki peran sebagai koordinator, fasilitator dan akselerator yang berkontribusi dalam mengelola lahan hutan negara bersama dengan pihak masyarakat kawasan hutan. KLHK yang berperan sebagai *policy creator*, kontribusi yang dilakukan KLHK berupa kebijakan untuk mendukung terselenggaranya Perhutanan Sosial. SDInpres berperan sebagai fasilitator yang berkontribusi dalam hal pendampingan masyarakat kawasan hutan. Bank BRI sebagai fasilitator berkontribusi dalam pengadaan pinjaman modal bagi para petani. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM) sebagai fasilitator dan akselerator menjadi LSM dibawah Perhutani. CDK Wilayah Jember sebagai fasilitator, koordinator dan akselerator berkontribusi dalam melakukan kerja-kerja pendampingan. Pemerintahan desa sebagai koordinator sekaligus pengawas dalam kegiatan perhutanan sosial dan media sebagai fasilitator dalam mempublikasikan kegiatan.
2. Pendapatan total yang diterima petani baik dari agroforestri ataupun dari non agroforestri rata-rata adalah sebesar Rp30.030.833/tahun dengan rata-rata pendapatan agroforestri sebesar Rp24.673.333/tahun dari rata-rata luasan lahan 2,2 Ha dan tergolong menguntungkan. Pendapatan total yang berasal dari non agroforestri rata-rata sebesar Rp5.357.500/tahun dan tergolong menguntungkan.
3. Kontribusi agroforestri pada petani anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti berkategori tinggi dengan persentase sebesar 84%. Kontribusi non agroforestri termasuk kategori sangat rendah karena hanya sebesar 14%, dikarenakan petani di Desa Pakis Kecamatan Panti bergantung penuh pada kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan saran yaitu, Pertama, perlu adanya peningkatan kerjasama antar berbagai lini dan memperluas hubungan dengan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait lainnya agar *road map* yang dilakukan oleh LMDH Rengganis dapat berjalan sesuai tujuan dalam pembangunan potensi hutan di kawasan Desa Pakis. Kedua, Bagi anggota LMDH Rengganis yang masih menjadikan Kawasan hutan sebagai pendapatan sampingan agar tetap mempertahankan hak kelolanya dan sebisa mungkin menjadikan hutan sebagai pendapatan utamanya karena dilihat dari kontribusi pendapatan agroforestry yang sangat besar bila dibandingkan dengan non agroforestry. Ketiga, Segera menjalankan peran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk dapat memaksimalkan sistem agroforestri seperti peternakan, perikanan, dan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember. (2015). *Masterplan Pembangunan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember*. Jember.
- Damsar dan Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.

- Dewi dan Qanti, R. S. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI MANGGIS TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI MANGGIS DI DESA CIKALONG, KECAMATAN SODONGHILIR, KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT Oleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 4(3), 936–945.
- H, Supriadi dan D, P. (2015). PROSPEK PENGEMBANGAN AGROFORESTRI BERBASIS KOPI DI INDONESIA. *Jurnal Perspektif*, 14(2), 135–150.
- Hariyati, Y. (2007). *EKONOMI MIKRO (Pendekatan Matematis dan Grafis)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Kastanya, A., Tjoa, M., Mardikanto, G., Latumahina, F., Bone, I., & Aponno, H. E. S. (2018). *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua*. Ambon: Manajemen Hutan PPs UNPATTI.
- Nugroho, H. C., & Zauhar, S. dan S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *J-PAL*, 5(1), 12–22.
- Sitepu, Y. P. (2014). *Kontribusi pengelolaan agroforestri terhadap pendapatan rumah tangga petani*. Institut Pertanian Bogor.
- Subandriyo. (2016). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Jayapura*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (p. 229 halaman). p. 229 halaman. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>
- Widianto, H., K.Suharjito, D., & Sardjono, M. A. (2003). *Bahan Ajaran 3: Fungsi dan Peran Agroforestri*. Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF).